

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pelaksanaan program pembangunan ekonomi Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Perekonomian merupakan tulang punggung penggerak dalam menghadapi tantangan globalisasi, oleh karena itu perekonomian harus dapat lebih ditingkatkan agar tercapai masyarakat adil dan makmur secara merata sesuai dengan salah satu tujuan dari pelaksanaan program pembangunan ekonomi Indonesia. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, serta sarana evaluasi kinerja. Sebagai media transparansi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas dapat diartikan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, upaya yang konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dengan menyusun laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun suatu laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan ketertiban pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tujuan dari organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Fungsi SAP yaitu sebagai landasan hukum pemerintah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk entitas sektor publik seperti Rumah Sakit dan Puskesmas-Puskesmas yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Indonesia.

Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 121 menjelaskan bahwa entitas pemerintah yang berstatus BLUD wajib menyusun laporan keuangannya seperti laporan keuangan neraca, realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis full accrual mulai diterapkan di seluruh entitas pemerintah pada tahun 2015. Dalam penyusunan keuangan suatu entitas misalnya Puskesmas, selain harus sesuai standar yang berlaku tentunya harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam akuntansi dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan

dengan SAP untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan suatu entitas yang berkualitas.

PMK Permenkes Nomor 43 tentang Puskesmas tahun 2019 dimana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi dari sumber situs (www.beritasatu.com, 2016) bahwa BPK mengungkapkan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan di bidang akuntansi di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), masih banyaknya permasalahan di Puskesmas mengenai lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peristiwa lainnya yang terjadi yaitu pelaporan keuangan puskesmas yang belum disusun dengan baik menjadi penghambat dalam pengelolaan Puskesmas, ketersediaan SDM yang belum kompeten dalam bidang akuntansi yang menangani pelaporan keuangan Puskesmas, masih kurangnya pelatihan di bidang keuangan, dan belum diterapkannya SAP berbasis akrual di Puskesmas. (www.bpkp.co.id, 2016).

Berdasarkan fakta yang terjadi didalam laporan keuangan di Puskesmas Manggis I seperti masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi atau yang berlatar belakang akuntansi dan juga faktor usia yang sudah lanjut juga menjadi faktor penghambat dalam pembuatan laporan keuangan Puskesmas. Puskesmas yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar penyelenggara Puskesmas dianggap mampu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap Puskesmas harus menjalankan kewajibannya dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena banyak pihak yang membutuhkan atau mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Puskesmas sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah. Menurut Roviyantie (2011) “Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi”, oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga dengan entitas pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015), hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern

berpengaruh signifikan positif, terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sudiarti dan Juliarsa (2020), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardini dan Miranti (2016), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) hasilnya yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Karyawan atau anggota organisasi yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan bekerja dengan maksimal (Kusumasari, dkk: 2017). Komitmen organisasi adalah sebagai keinginan pada sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasional mempengaruhi apakah seseorang pekerja tetap tinggal sebagai organisasi (*is retained*) atau meninggalkan untuk mengejar pekerjaan lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutiana dkk (2017) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Setyowati (2019) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manimpurung dkk

(2018) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, dkk (2020) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Tampubolon (2019), variabel komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Menurut Komarasari (2016) kapasitas yang belum memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal jika masih belum didukung dengan teknologi informasi. Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Pemanfaatan Teknologi Informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2015), hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Darwanis (2017), hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD Aceh Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nilam Sari (2016), hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Bungo. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon dan Ahmad Basid (2019), hasilnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun *financial* perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reno (2017), hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017), hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi, dkk (2017), hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian

intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020), hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di (BPKAD) Kabupaten Badung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta dkk (2017), membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah karena mempunyai kekuatan hukum. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, daerah, dan satuan unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme *procedural* yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010 : 139). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armel (2017), hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Dumai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sako dan Lantowa (2018), hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti, dkk

(2014), hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maeka Sari, dkk (2014), hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Jembrana. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Karyana dan Suaryana (2017), penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya, maka penulis ingin mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan membahasnya secara lebih rinci tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I?

4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I?
5. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di UPTD Puskesmas Manggis I.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap teori *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku pemakai dalam menerima dan menggunakan sistem informasi pada setiap perusahaan. Kemudahan penggunaan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu khususnya dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini diharapkan dapat menambah khazanah perpustakaan di kampus dengan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di kemudian hari.

UNMAS DENPASAR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori yang baik memiliki kegunaan (*utility*), dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita.

2.1.1 Teori *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi dari *Theory of Reasoned Action Model (TRA)* yang secara khusus telah disesuaikan dengan model penerimaan sistem informasi oleh pengguna/*user* (Davis, et al, 1989). TAM memiliki dua sisi yaitu sisi pertama atau yang biasa disebut *beliefs* yang terdiri atas *perceived usefulness* dan *perceived ease-of use* dan sisi yang kedua terdiri dari *attitude*, *behavior intention to use* dan *usage behavior* (Petra, 2005). TAM menjelaskan hubungan antara keyakinan/*beliefs (usefulness dan ease of use)* dengan sikap/*attitude*, tujuan/*intentions* pemakai, serta penggunaan nyata dari suatu sistem. Konsep TAM dikembangkan oleh Davis (1989) yang memaparkan bahwa teori ini sebagai landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku

pemakai dalam menerima dan menggunakan sistem informasi (Handayani, 2007). Model ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor kunci dari perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan pengadopsian teknologi informasi tersebut (Seeman, 2009). Konsep TAM diharapkan akan membantu memprediksi sikap dan penerimaan seseorang terhadap teknologi dan dapat memberikan informasi yang diperlukan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong sikap individu tersebut (Lee, 2010). TAM mempunyai tujuan menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan empat variabel yaitu persepsi tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), dan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*). Model ini telah terbukti memberikan gambaran pada aspek perilaku pengguna teknologi informasi seperti komputer, dimana banyak pengguna komputer dapat dengan mudah menerima teknologi informasi karena sesuai dengan yang diinginkannya (Iqbaria et al., 1997).

- 1) Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa pengguna suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Thompson et al. (1991) menyimpulkan kemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. Thompson (1991) juga menyebutkan bahwa individu

akan menggunakan sistem jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan (*usefulness*) positif atas penggunaannya.

- 2) Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) mampu meyakinkan pengguna bahwa sistem yang akan digunakan mudah dan bukan merupakan beban bagi mereka. Sistem yang mudah digunakan akan terus dipakai oleh perusahaan. Persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi kegunaan, sikap, minat perilaku dan penggunaan senyatanya, Chau dalam Wiyono (2008). Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Menurut Goodwin (1987), Silver (1988), dalam Maskur (2005), intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya.
- 3) Sikap Terhadap Penggunaan (*Attitude Toward Using*). Sikap pada penggunaan sesuatu menurut Aakers dan Myers (1997) adalah, sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu produk. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. Sikap terhadap penggunaan teknologi didefinisikan sebagai evaluasi dari pemakai tentang ketertarikannya dalam menggunakan teknologi, Arif Hermawan (2008) dalam Suseno (2009).

4) Minat Perilaku Penggunaan (*Behavioral Intention to Use*) adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi (Davis, 1989). Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, misalnya motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain. Arief Hermawan (2008) dalam Suseno (2009) mendefinisikan minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*) sebagai minat (keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku tertentu.

2.1.2 Kaitan teori TAM dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kim (2009) mengatakan bahwa dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) akan dapat memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi informasi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Hal ini disebabkan karena model TAM berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi yang dalam hal ini berlandaskan minat (*intention*). Hal ini berarti pengguna (sumber daya manusia) yang memiliki kompetensi yang tinggi akan memiliki minat (*intention*) untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik atau tinggi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, maka semakin baik kualitas pekerjaan (laporan keuangan) yang berhasil diselesaikan.

2.1.3 Kaitan teori TAM dengan Komitmen Organisasi

(Davis, 1989). TAM digunakan individu atau organisasi dalam penggunaan TI untuk peningkatan kinerja. Davis et al. (1989) melaporkan bahwa *perceived easy of use* (persepsi kemudahan penggunaan) memengaruhi *perceived usefulness* (kegunaan persepsian) penggunaan komputer dalam melakukan tugas sehari-hari.

Baik kegunaan persepsian maupun persepsi kemudahan penggunaan menentukan sikap terhadap penggunaan komputer dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Sedangkan sikap ini menentukan niat, kemudian niat menentukan perilaku menggunakan komputer.

2.1.4 Kaitan teori TAM dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kim (2009) mengatakan bahwa dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) akan dapat memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi informasi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Hal ini disebabkan karena model TAM berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi yang dalam hal ini berlandaskan minat (*intention*). Jika pengguna semakin memiliki kepercayaan tinggi terhadap teknologi serta memiliki minat yang tinggi untuk bekerja maka kualitas laporan akan memiliki kualitas yang baik.

2.1.5 Kaitan teori TAM dengan Sistem Pengendalian Intern

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu teori yang dibuat Davis (1986) mengenai pemaparan bagaimana pemanfaatan teknologi yang baik yang akan dimanfaatkan oleh pengguna teknologi dan dapat memberikan manfaat yang baik pula untuk penggunanya. Penggunaan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dimaksud adalah pemerintah. Mengingat *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam implementasinya bisa mempermudah pekerjaannya, maka teori ini dapat dipakai sebagai acuan bagi pengguna dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan pengendalian intern sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.6 Kaitan teori TAM dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Sugiartini dan Dharmadiaksa (2016) Berpendapat TAM meyakini bahwa dalam penggunaan teknologi sistem informasi akan mampu meningkatkan kinerja individu atau organisasi, dan penggunaannya akan mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka teori ini dapat dipakai sebagai acuan bagi pengguna dalam hal ini pemerintah lebih cepat mengetahui pembaruan standar akuntansi pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

2.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di dalam sebuah perusahaan atau organisasi memiliki peran yang sangat penting. Pengelolaan, perencanaan dan pengoorganisasian dilingkungan perusahaan memerlukan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan prosesnya. Sumber Daya Manusia atau Karyawan adalah aset perusahaan yang penting untuk diperhatikan perusahaan sekaligus harus dijaga sebaik mungkin. Melihat kondisi di atas manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi, tugas dan keadaan sumber daya manusia atau karyawan di dalam sebuah perusahaan. Menurut Mangkunegara (2012: 40) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Menurut Bintoro dan Daryanto (2017: 15) menyatakan bahwa “Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan

efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal”. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut Wibowo (2017: 271). Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu Arif (2018: 98). Menurut Bintoro (2017: 106) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai pegawai baik individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi bersangkutan dengan menyertakan kemampuan, ketekunan, kemandirian, kemampuan mengatasi masalah sesuai batas waktu yang diberikan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Busro (2018:89)

2.1.8 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut menurut Indra Kharis (2010). Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan

tertentu seorang individu. Karyawan atau anggota organisasi yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan bekerja dengan maksimal (Kusumasari, dkk: 2017). Komitmen organisasi menjadikan karyawan lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya serta berusaha untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Luthans (dalam Wibowo, 2017) komitmen organisasi sering didefinisikan sebagai: a. sebuah keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, b. keinginan untuk mendesak usaha pada tingkat tinggi atas nama organisasi, c. keyakinan yang pasti dalam dan penerimaan atas nilai-nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, komitmen adalah suatu sikap yang mencerminkan loyalitas pekerja pada organisasi dan merupakan suatu proses yang sedang berjalan melalui mana peserta organisasi menyatakan perhatian mereka terhadap organisasi dan kelanjutan keberhasilan dan kesejahteraan. Colquitt, Lepine dan Wesson (dalam Wibowo, 2017) komitmen organisasi adalah sebagai keinginan pada sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasional mempengaruhi apakah seseorang pekerja tetap tinggal sebagai organisasi (is retained) atau meninggalkan untuk mengejar pekerjaan lain.

2.1.9 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna menurut Bambang Warsita (2008:135). Pemanfaatan Teknologi Informasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek

kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas, jarak, tempat, ruang dan waktu. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan segala bentuk penggunaan teknologi yang diterapkan untuk dapat memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik dimana tingkat kegunaannya dapat diukur berdasarkan kedalaman pemanfaatan, tingkat pemanfaatan dan jumlah aplikasi yang digunakan. Pada umumnya pengguna teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan. Persepsi negatif akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya persepsi negatif berkembang setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Model TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna melalui persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi (Rasyid, 2017). Menurut Setyowati, Isthika, & Pratiwi (2016). Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2.1.10 Sistem Pengendalian Intern

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu

sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2017: 129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Hery (2016: 159) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

2.1.11 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan (Mahmudi, 2016:271). Penerapan Standar Akuntansi (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi serta akuntabilitas (Nordiawan, 2012:23). Menurut Suwanda (2015:8) standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Bastian (2013:138) standar akuntansi

pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam rangka memenuhi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah (Windyaningrum, 2010) Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan standar akuntansi pemerintahan antara lain penyaji laporan keuangan, auditor, organisasi profesi akuntansi, akademisi, dan pemerintah (Mahmudi, 2016:271).

2.1.12 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2016: 105) kualitas laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Winwin dan Abdulloh (2017: 7) bahwa pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan output berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan, pelaporan keuangan seperti ini dapat dicapai apabila memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan. Menurut Dwi dan Mahfud (2017: 41) Laporan keuangan merupakan salah satu

wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Menurut Erlina dkk (2015: 25) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran orang yang menilai atau merinci pengukuran, pencatatan, dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015) menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif, terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Rahmadani (2015) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan Rahmadani (2015) yaitu di variabel independen karena penelitian sekarang tidak memakai variabel sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD Kabupaten Bandung yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Yuliani & Agustini (2016) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan Yuliani & Agustini (2016) yaitu di variabel independen karena penelitian sekarang tidak memakai variabel pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kemudian dalam penelitian Rohman, dkk (2020) bertujuan untuk mendapatkan bukti tentang pengaruh sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Serang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS (Statistics Product and Service Solution) 25. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang dilatih dan memiliki kemampuan lebih mengetahui laporan keuangan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Serang, artinya semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian intern,

maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang, artinya semakin tinggi tingkat komitmen organisasi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Rohman, dkk (2020) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan Rohman, dkk (2020) dengan yang sekarang tidak ada.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2018) Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji peran variabel komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Bantul. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan MRA disimpulkan sebagai berikut: (1) sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan (2) komitmen organisasi memperkuat sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Marfuah (2018) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan Marfuah (2018) dengan yang sekarang yaitu, penelitian yang sekarang tidak memakai variabel pemoderasi.

Kemudian dalam penelitian Anik Wuriasih (2019) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa faktor (kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi) terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian akuntansi pada BPKAD Manokwari. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Metode analisis data penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Anik Wuriasih (2019) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian Anik Wuriasih (2019) yaitu di variabel independen karena penelitian Anik Wuriasih (2019) tidak memakai variabel penerapan standar akuntansi pemerintah.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Fredrik Laitera, dkk (2021) Penelitian yang dilakukan dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya). Penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan metode analisis data menggunakan teknik analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Fredrik Laitera, dkk (2021) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian Fredrik Laitera, dkk (2021) yaitu di variabel independen karena penelitian sekarang tidak memakai variabel sistem akuntansi keuangan daerah.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fatimah, dkk (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis data yaitu data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarlang langsung kepada responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten. Analisis data menggunakan pengujian hipotesis regresi linier berganda dengan uji t (parsial) dan uji f (simultan) dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Sitti Fatimah, dkk (2021) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian Sitti Fatimah, dkk (2021) yaitu di variabel independen karena penelitian Sitti Fatimah, dkk (2021) tidak memakai variabel komitmen organisasi.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data angket atau kuesioner. Metode

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Suryani (2018) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian Suryani (2018) yaitu di variabel independen karena penelitian sekarang tidak memakai variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan penelitian sekarang memakai variabel komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Tingginehe, dkk (2021) Kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya komitmen organisasi, penggunaan teknologi, pemahaman kebijakan, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen organisasi, penggunaan teknologi, penerapan SAP dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan variabel penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Tingginehe, dkk (2021) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian Tingginehe, dkk (2021) yaitu di variabel independen karena penelitian sekarang tidak memakai variabel pemahaman kebijakan, pengawasan keuangan daerah dan penelitian sekarang memakai variabel kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan standar akuntansi pemerintah.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramdany dan Setiawan (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pengendalian Internal (PI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (KLKP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKTI dan PI berpengaruh signifikan terhadap KLKP, sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap KLKP. Penelitian ini terbatas dilakukan dilingkungan satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan di pulau Jawa.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Ramdany dan Setiawan (2021) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian

Ramdany dan Setiawan (2021) yaitu di variabel independen karena penelitian sekarang tidak memakai variabel Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan penelitian sekarang memakai variabel komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah dan teknik analisis yang dipakai Ramdany dan Setiawan (2021) menggunakan analisis SmartPLS sedangkan penelitian yang sekarang memakai analisis regresi linier berganda .

